PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP)

TAHUN 2019

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2019 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dari 09 program yang dilaksanakan. Seluruh kegiatan terbebut dilaksanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai 5 (Lima) sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri atas realisasi Kinerja Tahun 2019 menunjukan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 5 (Lima) sasaran yang telah ditetapkan adalah berkisar di atas 95%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 5 (Lima) sasaran yang berhasil mencapai tingkat dengan kategori "Berhasil". Adapun kelima sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja
1	2	3
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	97,81 %
2	Meningkatnya Pelayanan Publik	98,78 %
3	Meningkatnya ketahanan ideologi berbangsa dan bernegara	97,56 %
4	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat	95,36 %
5	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses kegiatan politik	99,98 %

Secara keseluruhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki anggaran sebesar **Rp 5.515.406.200,-** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp 5.104.437.372,-** atau **93, 68**% dari total anggaran tersebut,

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP tahun 2019 ini semoga dengan LKIP ini menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 selesai disusun dan disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun diukur dari sisi efektivitas, dan efisiensi serta ekonomisnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memerlukan suatu perencanaan yang strategis pada setiap program dan kegiatan agar apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman yang matang dan terarah serta usaha maksimal di setiap aparat, untuk berkomitmen mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan hasil akhir kegiatanyang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai wujud akuntabilitas kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja guna mencapai visi, misi, program, kegiatan dan kebijakan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance). Menggambarkan tingkat pencapaian kinerja keberhasilan dan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari adanya keterbatasan penyusunan laporan, oleh karenanya saran dan masukan untuk perbaikan sangat kami harapkan.

Sampit, Januari 2020

Plt. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

H.NUR ASWAN, SH
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 19601104 198511 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi 4
1.4. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 5
1.5. Dasar Hukum 7
1.6. Maksud dan Tujuan 9
1.7. Sistematika Penulisan 9

BAB II. PERJANJIAN KINERJA 10
2.1. Perencanaan 10
2.2. Strategi dan Kebijakan 11
2.3. Perencanaan Kinerja 12
2.4. Perjanjian Kinerja 13

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 19
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 22
3.2. Realisasi Anggaran 32
3.3. Program dan Kegiatan 28

BAB IV. PENUTUP 43
4.1 Kesimpulan 43
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja 43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan 12
Tabel 2.3 Keterkatian Antara Strategis dan Indikator Sasaran 13
Tabel 3 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kondisi umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Timur

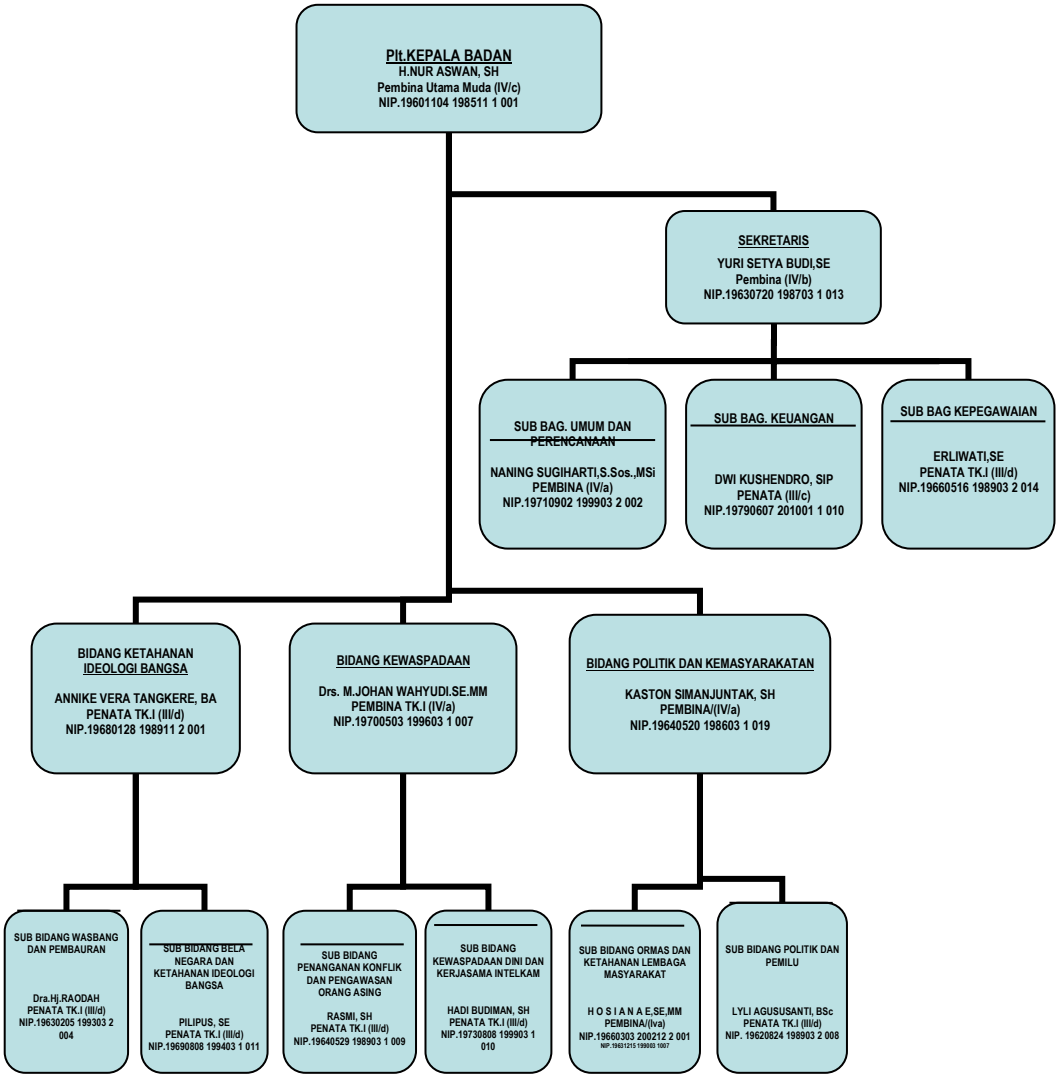

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 10 September 201

Dari struktur organisasi di atas dapat dilihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang merupakan pejabat Eselon II dan membawahi 1 (satu) Sekretariat,yang dipimpin Sekretaris Badan yang merupakan Pejabat Eselon III-a dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang merupakan eselon IV-a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga membawahi 3 (tiga) bidang, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang merupakan pejabat eselon III-b dan masing-masing Bidang membawahi 2 (dua) sub-bidang yang merupakan pejabat eselon IV-a. Jumlah pejabat fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 14 (empat belas) orang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon II-a (Kepala Badan), 1 (satu) orang pejabat eselon III-a (Sekretaris), 3 (tiga) orang eselon III-b (Kepala Bidang) dan 9 (sembilan) orang pejabat eselon IV-a (Kasubbid dan Kasubbag). Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2019 jabatan Sekretaris kosong dikarenakan mutasi ke Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bila ditinjau dari tupoksinya di dukung dengan jumlah pegawai sebanyak 21 (dua satu) orang PNS dan 17 (tujuh belas) orang Tenaga Kontrak.

- **Tugas, Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008 Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat mengalami perubahan menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Program dan kebijakan Kesatuan dan Persatuan Bangsa serta Politik;
b. Penerapan dan pelaksanaan pembinaan ketahanan Ideologi Bangsa serta pembinaannya;
c. Pelaksanaan kebijakan kewaspadaan terhadap usaha-usaha yang mengganggu ketahanan, Ideologi dan Kesatuan Bangsa;
d. Pelaksanaan dan Pembinaan Politik serta pembinaan Masyarakat;
e. Pembinaan dan penerapan kebijakan upaya menjaga Kualitas Ideologi dan Kerukunan Umat Beragama;
f. Pelaksanaan Ketatausahaan Badan; dan
g. Pengoptimalisasi kinerja Badan mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kotim

1.3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur, sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas pokok yaitu“ membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Adapun fungsi dari pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri adalah : Perumusan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Penyusunan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemberian Bimbingan Teknis dan Evaluasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Permasalahan dan isu yang berkembang di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa**

Permasalahan di bidang Ketahanan Ideologi Bangsa antara lain :

1. Ketahanan Ideologi Negara :
   - Menurunnya kebanggaan terhadap Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi nasional.
   - Adanya kontroversi terhadap penyebutan Pancasila sebagai salah satu pilar, padahal Pancasila merupakan dasar / filosofi bangsa.
2. Wawasan Kebangsaan
   - Merosotnya rasa, paham dan semangat kebangsaan di kalangan masyarakat.
3. Bela Negara
   - Merosotnya rasa, paham dan semangat bela negara di kalangan masyarakat
4. Nilai-nilai sejarah kebangsaan
   - Terjadinya pergeseran nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat dikarenakan melupakan sejarah perjalanan perjuangan bangsa.
5. Pembauran dan Kewarganegaraan
   - Masalah isu-isu yang bernuansa SARA dan tindakan diskriminatif terhadap warganegara yang bertentangan dengan hak-hak sipil sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

- **Bidang Kewaspadaan**

Permasalahan di bidang Kewaspadaan antara lain :

1. Terjadinya konflik di berbagai daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur yang rawan akan memicu terjadinya konflik antar suku karena banyaknya warga pendatang dari berbagai daerah.
2. Terjadinya konflik di berbagai daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur, rawan memicu terjadinya konflik antara warga lokal dengan perusahaan perkebunan dan perusahaan pertambangan akibat adanya pembukaan lahan yang mencaplok dan merusak lahan warga dan tanah adat.
3. Masih tingginya tindak kriminalitas dilingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga.
4. Rendahnya kepekaan, kesiagaan dan antisipasi serta peran serta masyarakat dalam urusan keamanan dan ketentraman dan ketertiban.

- **Bidang Politik dan Kemasyarakatan**
  1. Kurangnya pemahaman dan partisipasi politik masyarakat;
  2. Berkurangnya pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban dalam proses demokratisasi;
  3. Kerawanan dalam proses pilkada serentak.

1.4 Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur adalah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang setiap tahunnya wajib membuat dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dengan dasar hokum sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tantang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Inpres RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2016–2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 46).

1.5 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 adalah untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019, sebagai penjabaran hasil program kerja setiap satuan kerja. Sehubungan dengan hal tersebut maka wajib bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019. LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2019. Capaian kinerja diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2019 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja sebagai masukan bagi perbaikan kinerja

1.6 Sistematika Penulisan

(LKIP) Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV P E N U T U P

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi dan misi, tujuan, sasaran yang realistis dan cara-cara mencapainya untuk mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan akan dicapai. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur disusun berdasarkan hasil penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dan telah disesuaikan pula dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur.

Adapun format penyusunan LKIP mengacu kepada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Khusus penggunanan Indikator Kinerja Utama, mengacu pada Penetapan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017-2021.

❖ Visi dan Misi

Pada tanggal 9 Desember 2015 telah dilaksanakan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur periode masa jabatan 2016 -2021, dan telah dilantik secara definitif pada tanggal 17 Pebruari 2016 di Palangka Raya. Dalam periode masa jabatan 2016 – 2020 telah memasuki RPJMD tahap V dan tahun 2019 memasuki tahun ke 4 (empat) RPJMD tahap V. Pelaksanaan Pembangunan RPJMD sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati terpilih periode 2016 – 2021, maka untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan Rencana Pembangunan Daerah perlu ditetapkan tema dan prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005 – 2025 dan Prioritas Pemerintah Pusat.

Visi Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2016 – 2021 , Yaitu :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MADANI, DINAMIS, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING DALAM SUASANA RELIGIUS, KEBERSAMAAN, AMAN, SEJAHTERA"

Dengan Motto : ***(MANIS MANASAI)***

Yang diwujudkan melalui 4 butir Misi Kabupaten Kotawaringin Timur yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati periode 2016 – 2021, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak.
2. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
4. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan serta pariwisata dan budaya.

2.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur, serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur, strategi dan kebijakan ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan.

Rumusan strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2016-2021) sebagai berikut :

TABEL 2.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan			
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya ketahanan ideologi berbangsa dan bernegara	Melaksanakan urusan pemerintahan Umum terkait pendidikan politik, ideologi, nasionalisme, Ketahanan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan yang mendorong persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI;	Menumbuhkan semangat nasionalisme dan melestarikan nilai - nilai kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur.;
			Mengembangkan dan mensosialisasikan arti penting Nilai-Nilai Pancasila kepada Aparatur dan Masyarakat untuk memperkuat NKRI;
			Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan hingga kab/kota sesuai (Amanat Permendagri 71/2012);
	Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini;	Pembentukan Satuan Tugas Investigasi dan Pemberantasan Hasutan dan berita bohong (hoax), tim pemantauan daerah rawan konflik untuk meminimalisir konflik yang terjadi didalam masyarakat
	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, di masyarakat tentang etika dan budaya politik, demokrasi secara berkesinambungan dan komprehensif	Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas)
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik		
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan ornas/LSM	Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat	Sosialisasi UU tentang Ormas secara terstruktur, intensif dan komprehensif;

2.3 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renacana Strategis, baik berkaitan dengan upaya meningkatkan kinerja program melalui kegiatan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya dan direncanakan akan dilaksanakan lagi, maupun kegiatan baru dalam mendukung tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat menyeluruh. Sasaran-sasaran yang yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan strategis terkait juga dapat tercapai.

Adapun keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran dalam dilihat pada Tabel sebagai berikut :

TABEL 2.3
Keterkaitan Antara Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya ketahanan ideologi berbangsa dan bernegara	Persentase penurunan jumlah konfilik berlatar belakang agama
2	Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat	Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang sosial masyarakat
		Persentase FKDM yang terbentuk tingkat kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur
3	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik	Jumlah kegiatan pembinaan politik
5	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan ormas/LSM	Jumlah kegiatan pembinaan LSM, Ormas dan OKP

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi , kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya surat Edaran Menteri Negara PAN No.SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Dengan diterbitkannya Permenpan dan RB Nomor .53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka surat Edaran Menteri Negara PAN No.SE/31/M.PAN/12 /2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja / perjanjian kinerja antara lain adalah : untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat sebagai berikut :

SEKRETARIAT

Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja dan Target Program/Kegiatan anggaran digambarkan sebagai berikut **:**

Sasaran Strategis : **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**	
Indikator Kinerja	**Target**
Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	**100%**
Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	439 OB
Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	108 OK
Jumlah rapat koordinasi yang difasilitasi	128 OK
Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatus yang terpenuhi	**100%**
Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	21 OK
Cakupan kegiatan promosi yang diikuti	1 kali kegiatan
Jumlah kegiatan promosi yang diikuti	1 kali kegiatan

Adapun anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	APBD 2019
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**819,327,614**
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	310,037,614
	Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	322,340,000
	Rapat rapat koordinasi dan konsultsi ke dalam daerah	186,950,000
2	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**67,972,570**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	67,972,570
3	**Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah**	**28,500,000**
	Pelaksanaan Sampit EXPO	28,500,000

Sasaran Strategis :

Meningkatnya Pelayanan Publik	
Indikator Kinerja	**Target**
Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100%
Jumlah surat yang dilayani per tahun	1000 surat
Jumlah bidang yang dilayani per tahun	4 bidang
Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	1200m2
Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	4 bidang
Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 jenis
Jumlah komponen listrik yang disediakan	5 jenis
Jumlah bahan bacaan dan per-UU yang disediakan	3 jenis
Jumlah bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai	2784 OK
Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1200 m2
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3 Unit
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	15 Unit
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	55 kali
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan/dibeli	41 stel

Adapun anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	APBD 2019
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**440,730,097**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,300,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,740,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	186,216,312
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	43,800,195
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46,809,400
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4,785,000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan	24,480,000
	Penyediaan makanan dan minuman	69,600,000

2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**269,408,604**
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	40,400,000
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	185,658,604
	Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	7,950,000
	Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	35,400,000
3	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**30,217,000**
	Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	30,217,000

Sasaran Strategis : **Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Temuan**	
Indikator Kinerja	**Target**
Menurunnya jumlah hasil temuan pemeriksaan dari Inspektorat	1 dokumen

- **BIDANG KETAHANAN IDEOLOGI BANGSA**

Sasaran Strategis :	
Meningkatnya Ketahanan Ideologi Berbangsa dan Bernegara	
Indikator Kinerja	**Target**
Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang agama	0 %
Jumlah peserta FKUB dan jumlah Rapat koordinasi Dewan Penasehat FKUB	50 peserta
Jumlah peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Forum Pembauran Kebangsaan ,Ikrar Bersama Anak Bangsa, Forum Bela Negara.	216 orang/4 kali kegiatan

Adapun anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	APBD 2019
1	**Peningkatan Wawasan Kebangsaan**	**275,705,050**
	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	69,115,050
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur	206,590,000

BIDANG KEWASPADAAN

Sasaran Strategis :	
Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat	
Indikator Kinerja	**Target**
Persentase penurunan jumlah konflik sosial masyarakat	0 %
Persentase FKDM yang terbentuk tingkat kecamatan	100 %
Jumlah rapat Kominda dan pelaksanaan FKDM, Rakor FKDM, Pembentukan FKDM di kecamatan	3 kali kegiatan
Jumlah wilayah yang menjadi obyek pengawasan	2 kecamatan
Jumlah Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan	4 aksi daerah
Jumlah desa/kecamatan yang dipetakan	1 peta daerah rawan konflik
Jumlah desa/kecamatan yang dipantau	17 kecamatan

Adapun anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	APBD 2019
1	**Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**825,968,805**
	Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	384,287,130
	Pengawasan Orang Asing	184,365,850
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah	257,315,825

BIDANG POLITIK DAN KEMASYARAKATAN

Sasaran Strategis :	
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses kegiatan politik	
Indikator Kinerja	**Target**
Jumlah peserta penyuluhan	125 orang/2 kegiatan
Jumlah parpol yang terdaftar	12 parpol
Jumlah parpol dan orams/LSM yang didata dan dipantau	58 ormas/LSM

Adapun anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	APBD 2019
1	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**	**375,000,000**
	Penyuluhan kepada masyarakat	181,692,000
	Penyusunan data base partai politik	116,843,000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	76,465,000

Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada ***Lampiran 3.***

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi pada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberian amanah.

Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 /IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan, baik keberhasilan – keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2019. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan katagorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi 4 (empat) katagori berikut :

> 100 %	: Sangat Berhasil
91% - 100 %	: Berhasil
81 % - 90%	: Cukup Berhasil
< 81 %	: Kurang Berhasil

TABEL.3

REKAPITULASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	**Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan**	**819,327,614**	**795,886,035**	**97,48**
	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	310,037,614	287,245,078	92,65
	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	322,340,000	321,731,657	99,81
	Jumlah rapat koordinasi yang difasilitasi	186,950,000	186,909,300	99,98
2	**Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi**	**67,972,570**	**67,972,570**	**100**
	Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	67,972,570	67,972,570	100
3	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi**	**4,138,750**	**4,127,980**	**99,74**
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	4,138,750	4,127,980	99,74
4	**Cakupan kegiatan promosi yang diikuti**	**30,000,000**	**28,500,000**	**95**
	Jumlah kegiatan promosi yang diikuti	30,000,000	28,500,000	95
5	**Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan**	**437,747,407**	**421,365,023**	**97,33**
	Jumlah surat yang dilayani per tahun	9,300,000	9,300,000	96,25
	Jumlah bidang yang dilayani per tahun	55,740,000	48,843,849	87,63
	Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	186,216,312	176,774,274	94,93

	Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	43,800,195	43,799,000	99,95
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	53,857,900	53,832,900	99,95
	Jumlah komponen yang disediakan	4,785,000	4,785,000	100
	Jumlah bahan bacaan dan per-UU yang disediakan	24,480,000	24,480,000	100
	Jumlah bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai	59,595,000	59,550,000	99,92
6	**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**269,408,604**	**265,972,408**	**99,50**
	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	40,400,000	40,365,000	99,91
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	185,658,604	182,262,408	98,17
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	7,950,000	7,945,000	99,94
	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	35,400,000	35,400,000	100
7	**Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur**	**30,217,000**	**29,930,000**	**99,05**
	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan/dibeli	30,217,000	29,930,000	99,05
8	**Meningkatnya Ketahanan Ideologi Berbangsa dan Bernegara**	**275,705,050**	**268,965,000**	**97,69**
	Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang agama	0	-5,88%	105,88%
	Jumlah peserta FKUB dan jumlah Rapat koordinasi Dewan Penasehat FKUB	69,115,050	67,715,000	97,97
	Jumlah peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Forum Pembauran Kebangsaan ,Ikrar Bersama Anak Bangsa, Forum Bela	206,590,000	201,250,000	97,42

	Negara			
9	**Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat**	**825,968,805**	**787,609,945**	**95,36**
	Persentase penurunan jumlah konflik sosial masyarakat	0	-1%	101%
	Persentase FKDM yang terbentuk tingkat kecamatan	100	100	100
	Jumlah rapat Kominda dan pelaksanaan FKDM, Rakor FKDM, Pembentukan FKDM di kecamatan	384,287,130	379,207,000	98,68
	Jumlah wilayah yang menjadi obyek pengawasan	184,365,850	167,618,020	90,92
	Jumlah Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan	257,315,825	240,784,926	93,58
10	**Meningkatkan kualitas kehidupan politik masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan budaya politik**	**375,000,000**	**374,970,192**	**99,98**
	Jumlah peserta penyuluhan	181,692,000	181,691,192	100
	Jumlah parpol yang terdaftar	116,843,000	116,843,000	100
	Jumlah parpol dan ormas/LSM yang didata dan dipantau	76,465,000	76,436,000	99,96
Jumlah Nilai Capaian				**981,13**
Capaian rata-rata kinerja				**98,11**

Total nilai capaian kinerja adalah 981,13 atau dengan nilai rata-rata 98,11% masuk dalam kategori penilaian **Berhasil.**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran , pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara

membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari output, outcome. Media pengukuran kinerja berupa Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan). Dapat dilihat pada ***Lampiran 4.***

Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur.

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran I . Bidang Sekretariat

1. Sasaran Strategis : **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**

Pengukuran Kinerja :

Indikator Kinerja	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	**100**	**97,14**	**97,48**
Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	100	92,65	92,65
Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	100	99,81	99,81
Jumlah rapat koordinasi yang difasilitasi	100	99,98	99,98
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang terpenuhi	100	**99,05**	**99,05**
Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	100	99,05	99,05
Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	**100**	**99,74**	**99,74**
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	100	99,74	99,74
Cakupan kegiatan promosi yang diikuti	**100**	**95**	**95**
Jumlah kegiatan promosi yang diikuti	100	95	95

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukan bahwa capaian indikator kinerja sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja" adalah sebesar **97,81%** berarti masuk dalam kategori capaian **" Berhasil".**

Program / kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan RKA/DPA SKPD

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- Pelaksanaan Sampit Expo

Keterangan :

- Pada tahun 2018, berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran : "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja" sebesar 97,47%. Ada 4 Program yang mendukung tercapainya sasaran tersebut yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Pada setiap program capaian kinerja hampir mencapai 100%.
- Pada tahun 2019, berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran : "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja" sebesar 97,14%. Ada 4 Program yang mendukung tercapainya sasaran tersebut yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Pada setiap program capaian kinerja di atas 90%.

2. Sasaran Strategis :
Meningkatnya Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	**100**	**97,80**	**97,80**
Jumlah surat yang dilayani per tahun	100	100	100
Jumlah bidang yang dilayani per tahun	100	87,63	87,63
Luas kantor yang dilayani jasa	100	94,93	94,93

kebersihan			
Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	100	100	100
Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100	99,95	99,95
Jumlah komponen yang disediakan	100	100	100
Jumlah bahan bacaan dan per-UU yang disediakan	100	100	100
Jumlah bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai	100	99,92	99,92
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	**100**	**99,50**	**99,50**
Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100	99,91	99,91
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100	98,17	98,17
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100	99,94	99,94
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100	100	100
Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	**100**	**99,05**	**99,05**
Jumlah pakaian dinas harian beserta perlenkapannya yang disediakan/dibeli	100	99,05	99,05

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukan bahwa capaian indikator kinerja sasaran "Meningkatnya Pelayanan Publik" adalah sebesar **98,78%** berarti masuk dalam kategori capaian **" Berhasil".**

Program / kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Keterangan :

- Pada tahun 2018, berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran : "Meningkatnya Pelayanan Publik" sebesar 99,39%. Ada 3 Program yang mendukung tercapainya sasaran tersebut yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Pada setiap program capaian kinerja rata-rata hampir mencapai 100%.
- Pada tahun 2019, berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran : "Meningkatnya Pelayanan Publik" sebesar 98,78%. Ada 3 Program yang mendukung tercapainya sasaran tersebut yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Pada setiap program capaian kinerja rata-rata nilai capaiannya di atas 95%.

3. Sasaran Strategis : **Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Temuan**	
Indikator Kinerja	**Target**
Menurunnya jumlah hasil temuan pemeriksaan dari Inspektorat	1 dokumen

Keterangan:

- Pada tahun 2017, Audit hasil pemeriksaan Inspektorat Kab.Kotim TA.2017 mengenai Pertanggungjawaban atas Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung tidak ada temuan (untuk Keuangan) sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan pengelolaan keuangan.
- Untuk Naskah Hasil Pemeriksaan Aset TA.2017 yaitu sebagai berikut :
  - Pencatatan asset pada KIB tidak normatif
  - Terdapat pengadaan barang/pekerjaan TA.2017 belum tercatat pada KIB
  - Terdapat barang extrakomptable masih tercatat pada KIB tahun 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait masalah asset, data-data yang terkait dengan perihal tersebut di atas telah dipenuhi sebagaimana mestinya dan berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak Inspektorat bahwa tanggapan hasil audit tidak boleh dicantumkan secara terbuka karena bersifat rahasia.

Sasaran II : Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa

Sasaran Strategis :
Meningkatnya Ketahanan Ideologi Berbangsa dan Bernegara

Pengukuran Kinerja :

Indikator Kinerja	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Ketahanan Ideologi Berbangsa dan Bernegara	**100**	**97,69**	**97,69**
Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang agama	0	-1%	101%
Jumlah peserta FKUB dan jumlah Rapat koordinasi Dewan Penasehat FKUB	100	97,97	97,97
Jumlah peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Forum Pembauran Kebangsaan ,Ikrar Bersama Anak Bangsa, Forum Bela Negara, Pembentukan Forum Bela Negara di Kecamatan	100	97,42	97,42

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukan bahwa capaian indikator kinerja sasaran " Meningkatnya Ketahanan Ideologi Berbangsa dan Bernegara adalah sebesar **"97,69%"** yang masuk dalam kategori capaian **" Berhasil ".**

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

- Forum Kerukunan Umat Beragama
- Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama

Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

- Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
- Forum Pembauran Kebangsaan
- Ikrar Bersama Anak Bangsa
- Forum Bela Negara

Keterangan :

- Pada Tahun 2018, semua kegiatan pada Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama dan Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa capaiannya sekitar di atas 90% dan pada APBD-P TA.2018 mendapat tambahan anggaran pada Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Ikrar Bersama Anak Bangsa masing-masing sebesar Rp 150.000.000,- karena pada Tahun 2018 Kabupaten Kotawaringin Timur terpilih sebagai Tuan Rumah Se-Kalteng untuk 2 kegiatan tersebut.
- Adapun capaian pada Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa sebesar 89,08% dikarenakan ada anggaran yang tidak dapat terserap maksimal dan tidak dapat dicairkan salah satunya adalah Belanja Panitia Pelaksana Kegiatan (yang tercantum pada kode rekening Belanja Pegawai), dalam hal ini adalah Honorarium Tim Kegiatan Bidang, sesuai dengan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Pasal 8 ayat (2) yang isinya PNS yang diberikan tambahan penghasilan tidak berhak lagi mendapatkan honorarium tim, honorarium panitia dan uang insentif, kecuali insentif karena memiliki keahlian/spesialisasi.
- Capaian persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang agama sebesar 100% dikarenakan pada tahun 2018 terjadi 2 (dua) konflik agama.
- Pada Tahun 2019, semua kegiatan pada Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama dan Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa capaiannya hampir rata-rata di atas 95% dan pada APBD-P TA.2019 mendapat tambahan anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada program bidang Ketahanan Ideologi Bangsa.

Sasaran III : Bidang Kewaspadaan

Sasaran Strategis :
Meningkatnya kewaspadaan masyarakat

Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat	**100**	**95,36**	**95,36**
Persentase penurunan jumlah konflik sosial masyarakat	0	-5,88 %	105,88%
Persentase FKDM yang terbentuk tingkat kecamatan	100	100	100
Jumlah rapat Kominda dan pelaksanaan FKDM, Rakor FKDM, Pembentukan FKDM di kecamatan	100	98,68	98,68
Jumlah wilayah yang menjadi obyek pengawasan	100	90,92	90,92

Jumlah Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan	100	93,58	93,58

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran " Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat " adalah **95,36%** yang berarti masuk dalam kategori capaian **"Berhasil".**

Program / kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan

b. Pengawasan Orang Asing

c. Pemetaan Daerah Rawan Konflik

d. Pemantauan Konflik Sosial

e. Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Keterangan :

- Pada Tahun 2018, pencapaian sasaran untuk semua kegiatan yang dilaksanakan rata-rata dikisaran 70-90%. Pada APBD-P 2018 ada penambahan anggaran untuk kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI).
- Capaian sasaran yang hanya berkisar pada angka 70-90% dikarenakan ada beberapa kegiatan yang anggarannya tidak dapat terserap maksimal dan tidak dapat dicairkan salah satunya adalah Belanja Panitia Pelaksana Kegiatan (yang tercantum pada kode rekening Belanja Pegawai), dalam hal ini adalah Honorarium Tim Kegiatan Bidang, sesuai dengan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Pasal 8 ayat (2) yang isinya PNS yang diberikan tambahan penghasilan tidak berhak lagi mendapatkan honorarium tim, honorarium panitia dan uang insentif, kecuali insentif karena memiliki keahlian/spesialisasi.
- Untuk capaian persentase penurunan jumlah konflik sosial masyarakat pada Tahun 2018 sekitar 35,71% karena ada beberapa konflik terjadi yaitu konflik lahan sebanyak 10 konflik dan konflik sosial sebesar 7 konflik. Dan hal ini mengalamani kenaikan dibandingkan tahun 2017, konflik lahan yang terjadi sebanyak 8 konflik dan konflik sosial sebanyak 4 konflik.
- Pada tahun 2019, nilai capaian pada setiap kegiatan di program bidang ini rata-rata berada pada kisaran 90%, adapun kegiatan yang hanya mencapai 90% dikarenakan ada beberapa belanja pada kegiatan tersebut (Pengawasan orang Asing) tidak terserap secara maksimal dan realisasinya hanya berkisar sekitar 80%.
- Pada tahun 2019, Untuk capaian persentase penurunan jumlah konflik sosial masyarakat pada Tahun 2019 terjadi 5 aksi demonstrasi, 8 kasus sengketa lahan dan 3 kasus perkelahian dengan realisasi -5,88% dengan capaian melebihi yang ditargetkan

yaitu sebesar 105,88% karena jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, jumlah kejadian konflik yang terjadi berdasarkan data yang ada mengalami penurunan dan berpengaruh pula pada indikator kinerja tingkat pencapaian persentasenya.

Sasaran IV : Bidang Politik dan Masyarakat

Sasaran Strategis :
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses kegiatan politik

Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatkan kualitas kehidupan politik masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan budaya politik	**100**	99,98	99,98
Jumlah peserta penyuluhan	100	100	100
Jumlah parpol yang terdaftar	100	100	100
Jumlah parpol dan ormas/LSM yang didata dan dipantau	100	99,96	99,96

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran Pendewasaan Sikap dan perilaku yang tertib, demokrasi dan saling menghargai dalam berpolitik" adalah sebesar **99,98%** yang berarti masuk dalam kategori capaian **"Berhasil".**

Program / kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

Program Pendidikan Politik Masyarakat :

- Penyuluhan Kepada Masyarakat (Pembinaan Partai Politik, Forum Komunikasi Ormas/LSM, Sosialisasi terkait Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019)
- Penyusunan Database Partai Politik (Akurasi Data dan Pemantauan Kegiatan Partai Politik, Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik)
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Akurasi Data Ormas/LSM)

Keterangan :

- Pada tahun 2018, Pelaksanaan 4 kegiatan tersebut di atas telah mencapai 100% , sesuai dengan target yang direncanakan. Dan pada kegiatan Dewan Adat Dayak (DAD) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 150.000.000,- yang salah satunya digunakan untuk Belanja Hibah/Bantuan Sosial berupa peralatan kantor yaitu PC/Desktop, Printer dan Proyektor.
- Pada tahun 2019, Pelaksanaan 3 kegiatan tersebut di atas, 2 (dua) kegiatan diantaranya dapat mencapai target sedangkan ada 1 kegiatan pun hampir maksimal pencapaiannya yaitu 99,96% dan dapat dinilai secara keseluruhan semua kegiatan pada program ini dapat terlaksana dengan baik

3.2 Realisasi Anggaran

Guna melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 menganggarkan jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.381.393.400; dan Belanja Langsung sebesar Rp 3.134.012.800;

Data anggaran dan realisasi DPPA Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tahun 2019 tersaji sebagai berikut :

NO	Program / Kegiatan	APBD 2019	APBD-P 2019	Realisasi		
				Keuangan		Real Fisik
				Rp.	%	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	**2,481,393,400**	**2,381,393,400**	**2,059,138,218**	**86.47**	**90.00**
	BELANJA LANGSUNG	**2,936,927,800**	**3,134,012,800**	**3,045,299,154**	**97.17**	**99,88**
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	**1,186,208,521**	**1,257,102,021**	**1,217,251,058**	**96.83**	**97,81**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,300,000	9,300,000	9,300,000	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	33,720,000	55,740,000	48,843,849	88	88
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	334,147,614	310,037,614	287,245,078	93	93
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	43,800,195	43,800,195	43,799,000	100	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46,809,400	53,857,900	53,832,900	100	100
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,785,000	4,785,000	4,785,000	100	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	180,216,312	186,216,312	176,774,274	95	95
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	24,480,000	24,480,000	24,480,000	100	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	69,600,000	59,595,000	59,550,000	100	100
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	272,800,000	322,340,000	321,731,657	100	100
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	166,550,000	186,950,000	186,909,300	100	100
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**274,408,604**	**269,408,604**	**265,972,408**	**98.72**	**100.00**
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	55,400,000	40,400,000	40,365,000	99.91	100.00

	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	175,658,604	185,658,604	182,262,408	98.17	100.00
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7,950,000	7,950,000	7,945,000	99.94	100.00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	35,400,000	35,400,000	35,400,000	99.98	100.00
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	**30,217,000**	**30,217,000**	**29,930,000**	**99.05**	**100.00**
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	30,217,000	30,217,000	29,930,000	99.05	100.00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	**104,200,000**	**67,972,570**	**67,972,570**	**100.00**	**100.00**
	Pelatihan dan Pendidikan Formal	104,200,000	67,972,570	67,972,570	100.00	100.00
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**8,250,000**	**4,138,750**	**4,127,980**	**99.74**	**100.00**
	PROG.PENINGKATAN PROMOSI DAN INVESTASI DAERAH	**30,000,000**	**28,500,000**	**28,500,000**	**100.00**	**100.00**
	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	**250,155,000**	**275,705,050**	**268,965,000**	**97.56**	**100.00**
	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	52,865,000	69,115,050	67,715,000	97.97	100.00
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	197,290,000	206,590,000	201,250,000	97.42	100.00
	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	**703,488,675**	**825,968,805**	**787,609,946**	**95.36**	**95,74**

	Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	355,887,000	384,287,130	379,207,000	98.68	100.00
	Pengawasan Orang Asing	115,285,850	184,365,850	167,618,020	90.92	90.92
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah	232,315,825	257,315,825	240,784,926	93.58	93.58
	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	**350,000,000**	**375,000,000**	**374,970,192**	**99.99**	**100.00**
	Penyuluhan Kepada Masyarakat	181,692,000	181,692,000	181,691,192	100.00	100.00
	Penyusunan Data Base Partai Politik	95,013,000	116,843,000	116,843,000	100.00	100.00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	73,295,000	76,465,000	76,436,000	99.96	100.00
	J U M L A H	**5,418,321,200**	**5,515,406,200**	**5,104,437,372**	**93,68**	**96,59**

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp 5,515,406,200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5,104,437,372,- atau dengan capaian persentase sebesar 93,68%. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan 09 program dan 27 kegiatan, Dari seluruh kegiatan tersebut merupakan indikator sasaran dalam mencapai 2 (dua) sasaran strategis atau dengan kata lain kegiatan yang diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

1. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja" diukur melalui 6 (enam) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada Tabel 3.2.1 berikut :

Tabel 3.2.1

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**819,327,614**	**795,886,035**	**97,14**
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	310,037,614	287,245,078	92,65
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	322,340,000	321,731,657	99,81
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	186,950,000	186,909,300	99,98
2	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**67,972,570**	**67,972,570**	**100**
	Pendidikan dan pelatihan formal	67,972,570	67,972,570	100
3	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**4,138,750**	**4,127,980**	**100**
	Penyusunan RKA/DPA SKPD	4,138,750	4,127,980	99,74
4	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**30,000,000**	**28,500,000**	**1**
	Pelaksanaan Sampit EXPO	30,000,000	28,500,000	95

2. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran "Meningkatnya Pelayanan Publik" diukur melalui 14 (empat belas) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada Tabel 3.2.2 berikut :

Tabel 3.2.2

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**437,747,407**	**421,365,023**	**96,25**
	Penyediaan jasa surat menyurat	9,300,000	9,300,000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	55,740,000	48,843,849	87,63
	Penyediaan jasa kebersihan	186,216,312	176,774,274	94,93
	Penyediaan alat tulis kantor	43,800,195	43,799,000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	53,857,900	53,832,900	99,95
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,785,000	4,785,000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24,480,000	24,480,000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	59,595,000	59,550,000	99,92
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**269,408,604**	**265,972,408**	**98,72**
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40,400,000	40,365,000	99,91

	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	185,658,604	182,262,408	98,17
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7,950,000	7,945,000	99,94
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	35,400,000	35,400,000	100
2	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**30,217,000**	**29,930,000**	**100**
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	30,217,000	29,930,000	99,05

3. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran "Meningkatnya Ketahanan Ideologi Berbangsa dan Bernegara" diukur melalui 2 (dua) indikator. Indikator kinerja sasaran berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada Tabel 3.2.3 berikut :

Tabel 3.2.3

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	**Meningkatnya Ketahanan Ideologi Berbangsa dan Bernegara**	**275,705,050**	**268,965,000**	**97,56**
	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	69,115,050	67,715,000	97,97
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	206,590,000	201,250,000	97,42

4. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran "Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat " diukur melalui 3 (tiga) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada Tabel 3.2.4 berikut :

Tabel 3.2.4

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	**Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**825,968,805**	**787,609,946**	**95,36**
	Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	384,287,130	379,207,000	98,68
	Pengawasan Orang Asing	184,365,850	167,618,020	90,92
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah	257,315,825	240,784,926	93,58

5. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran "Pendewasaan sikap dan perilaku yang tertib, demokratis dan saling menghargai dalam berpolitik " diukur melalui 3 (tiga) indikator. Indikator kinerja sasaran berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada Tabel 3.2.5 berikut :

Tabel 3.2.5

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**	**375,000,000**	**374,970,192**	**99,98**
	Penyuluhan Kepada Masyarakat	181,692,000	181,691,192	100
	Penyusunan Data Base Partai Politik	116,843,000	116,843,000	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	76,465,000	76,436,000	99,96

Dari total anggaran tersebut diatas, yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan 2 (dua) sasaran strategis adalah Rp 1,101,673,855,- dan realisasi

penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp 1,056,574,946,- atau 95,90 % yang berarti masuk dalam katagori capaian Berhasil ". Dari 9 (sembilan) program diatas terdapat indikator sasaran dan realisasi capaian kinerja Keuangan dengan capaian berkisar di atas 95 % meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp 1,257,102,021,- dan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1,217,251,058,- (96,83%)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp 269,408,604,- dan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 265,972,408,- (98,72%)
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran sebesar Rp 30,217,000,- dan realisasi per 31 Desember 2019 Rp 29,930,000,- (99,05%)
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp 69,972,570,- dan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 69,972,570,- (100%)
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp 4,138,750,- dan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 4,127,980,- (99,74%)
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan anggaran sebesar Rp 30,000,000,- dan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 28,500,000,- (100%)
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp 275,705,050,- dan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 268,965,000 (97,56%)
8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran Rp 825,968,805,- dan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 787,609,948 (95,36%)
9. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan anggaran Rp 375,000,000,- dan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 374,970,192,- (99,98).

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

LKIP Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Bupati selaku pemberi amanah dan tugas.

Ada 09 (sembilan) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur melalui indikator kinerja *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja 2019. Dari hasil pencapaian kinerja kegiatan hampir keseluruhan di atas 95% dan capaian kinerja keuangan sebesar 93,68%. Dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah berhasil melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap 10 indikator sasaran dari 2 (dua) sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai kinerja sangat memuaskan dengan capaian berada di atas 90% dari seluruh indikator kinerja kegiatan .
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur sudah sesuai dengan tugas pokok yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur dimana sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur selama tahun 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan baik dengan ditunjang sarana prasarana yang cukup memadai, namun demikian masih terdapat beberapa hambatan dari internal dan eksternal antara lain :

- Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, tetapi masih kurangnya SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan.
- Sumberdaya yang terbatas dihadapkan pada dinamika sosial dan politik yang berkembang pesat.

Adapun langkah-langkah untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang ada adalah :

- Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat - diklat mapun pembinaan.

- Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini sebagai bahan peningkatan kinerja disemua bidang/bagian.

Oleh karena itu, diperlukan Strategi Peningkatan Kinerja antara lain :

- Kebijakan internal, yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi yaitu :
  a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
  b. Peningkatan Pengawasan akuntabilitas
  c. Penegakan aturan yang berlaku
- Kebijakan eksternal yaitu kebijakan yang dilakukan oleh SOPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan yang ada kaitannya dengan mengundang masyarakat banyak yaitu :
  a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur.
  b. Peningkatan koordinasi antar instansi sehubungan dengan adanya keterkaitan pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawringin Timur tahun 2019 ini disusun semoga bermanfaat bagi kita semua.

Sampit , Januari 2020

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Timur,

H.NUR ASWAN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19601104 198511 1 001